

## Pengaruh Budaya Masyarakat Perbatasan kepada Kebijakan Maritim dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional

M. Pane<sup>1</sup>, U. Suhud, D. Purwana & C. Anwar  
Universitas Negeri Jakarta  
[maniurpane@gmail.com](mailto:maniurpane@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to obtain a conceptual model that can present the cultural influence of border communities on the Indonesian government's maritime policy and its implications for Indonesia's national resilience, this model is needed as a basis for determining maritime policies that can have positive implications for strengthening Indonesia's national resilience. The conceptual model and framework is based on quantitative descriptive analysis method by describing the relationship between the variables and the indicators of each variable. The results of the study show that there is a significant influence between social culture of border communities and Maritime Policy, there is no significant effect between Economic activities of border communities and Maritime Policy, there is a significant influence between Illegal Activities at the border with Maritime Policy and there is a significant effect between Maritime Policy and National resilience*

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model yang dapat mempresentasikan pengaruh budaya masyarakat perbatasan kepada kebijakan maritim pemerintah Indonesia serta implikasinya terhadap ketahanan nasional Indonesia, model tersebut dibutuhkan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan maritim yang dapat memberi implikasi positif bagi penguatan ketahanan nasional Indonesia. Model dan kerangka konseptual disusun berdasarkan metode analisa deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan hubungan antara variabel beserta indikator-indikator yang dimiliki masing-masing variabel. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Kultur sosial masyarakat perbatasan dengan Kebijakan Maritim, tidak ada pengaruh yang signifikan antara Aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dengan Kebijakan Maritim, adanya pengaruh yang signifikan antara Kegiatan Illegal di perbatasan dengan Kebijakan Maritim, dan adanya pengaruh yang signifikan antara Kebijakan Maritim dengan Ketahanan nasional.*

### PENDAHULUAN

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa kejayaannya, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya merupakan kerajaan bahari dengan

kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Dengan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militernya melalui media laut, maka kedua kerajaan besar tersebut mampu menguasai seluruh nusantara bahkan hingga ke mancanegara (Pramono & Changming, 2019).

### ARTICLE INFO:

#### Article history:

Received 15 August 2021

Revised 27 August 2021

Accepted 1 September 2021

Available online 30  
September 2021

#### Keywords:

*Economic Activity,  
Illegal Activities,  
Maritime Policy,  
National Resilience,  
Social Culture.*

#### Kata Kunci:

*Aktivitas Ekonomi,  
Kebijakan Maritim,  
Ketahanan Nasional,  
Kegiatan Illegal,  
Kultur Sosial.*

Para pendahulu kita sangat menyadari bahwa dengan memiliki armada kekuatan laut yang besar, maka kejayaan akan dicapai. Prinsip yang sama juga dianut oleh China dan India, kedua negara berniat akan dapat mempertahankan kepentingannya negaranya dengan melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut (Bueger, 2015). Didalam pidato saat awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Bangsa Indonesia telah cukup lama memunggungi laut, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja keras demi mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, teluk, selat dan pantai merupakan masa depan bagi bangsa Indonesia. Dan untuk dapat mengembalikan kondisi bangsa sesuai dengan motto *Jalsveva Jayamahe* (justru dilaut kita jaya), maka kita harus kembali ke laut (Pattiradjawane & Soebago, 2015). Masyarakat dunia juga telah menganggap jika laut dapat menjadi sumber ekonomi yang baik jika dimanfaatkan secara optimal (*blue economy*), yang berarti pemanfaatan laut beserta segala sumber daya yang ada di laut untuk pembangunan ekonomi (Bari, 2017). Selain itu, TNI AL sebagai institusi yang berwenang didalam menegakkan kedaulatan dan hukum di laut, memandang laut bukan hanya sebagai media pemersatu bangsa Indonesia, namun juga sebagai media komunikasi dan media transportasi (Hozairi et al. 2018).

Walaupun pemerintah telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan diantaranya terkait dengan budaya masyarakat perbatasan yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Niode et al. 2021). Objek riset dalam penelitian ini difokuskan pada kebudayaan masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Filipina khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Perairan perbatasan Sulawesi Utara yang berbatasan langsung

dengan Filipina memiliki kerawanan khusus, karena sering dijadikan sebagai sarana kegiatan *Transnational Crime*. Sehingga dengan ditelitinya variabel-variabel yang terkait dengan kebudayaan masyarakat perbatasan, maka akan dapat ditentukan kebijakan maritim yang terbaik yang dapat memberi implikasi positif bagi ketahanan nasional Indonesia.

### **Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (a) Pengaruh kultur sosial masyarakat perbatasan Sulawesi Utara terhadap kebijakan maritim pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. (b) Pengaruh aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan Sulawesi Utara terhadap kebijakan maritim pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. (c) Pengaruh kegiatan ilegal masyarakat perbatasan Sulawesi Utara terhadap kebijakan maritim pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. (d) Pengaruh kebijakan maritim pemerintah Indonesia terhadap terwujudnya ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh model yang dapat mempresentasikan pengaruh budaya masyarakat perbatasan terhadap kebijakan maritim pemerintah Indonesia serta implikasinya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Model tersebut dibutuhkan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan maritim yang dapat memberi implikasi positif bagi penguatan ketahanan nasional. Model dan kerangka konseptual disusun berdasarkan metode analisa deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan hubungan antara variabel beserta indikator-indikator yang dimiliki masing-masing variabel, yang diuji melalui uji hipotesis. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Kultur sosial masyarakat perbatasan dengan Kebijakan Maritim, ada pengaruh yang signifikan antara Aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan

dengan Kebijakan Maritim, adanya pengaruh yang signifikan antara Kegiatan Illegal di perbatasan dengan Kebijakan Maritim dan adanya pengaruh yang signifikan antara Kebijakan Maritim dengan Ketahanan nasional.

### Kajian Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini, mengkaji berbagai artikel yang terkait dengan topik penelitian, yang diperoleh dari google scholar, dengan kata kunci Border Society, Maritime Policy and National Resilience. Berdasarkan artikel jurnal penelitian tersebut, terdapat 10 variabel yang saling berkaitan serta memiliki persamaan variabel dengan topik penelitian. Dari 10 variabel tersebut, dipilih 5 variabel, untuk dianalisa hubungan dan pengaruhnya secara empiris.

**Tabel 1. Penelitian sebelumnya.**

Hipotesis	Variabel Bebas		Variabel Terikat	Sumber
H-1	Social Culture	⇒	Maritime Policy	Carol et al (2018), Cocco (2017), Hozairi et al (2020)
H-2	Economic Activity	⇒	Maritime Policy	Chapsos et al (2015), Lumaksono et al. (2020), Bastari et al (2019)
H-3	Illegal Activity	⇒	Maritime Policy	Bueger (2014), Chapsos et al (2015), Pandjaitan et al (2020)
H-4	Maritime Policy	⇒	National Resilience	Bueger (2014), Bastari et al (2019), Hinrichs et al. (2015)

### Konsep Kultur Sosial.

Huffman & Hegarty (1993) mengatakan bahwa bahwa kultur sosial mempresentasikan pola, nilai, sifat atau prilaku yang dimiliki oleh masyarakat disuatu daerah. Kultur sosial memiliki dua aspek yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Aspek sosial mempengaruhi aspek personal, dan aspek personal mempengaruhi aspek sosial. Kebiasaan dan tradisi (kultur) yang

berkembang dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi pola berpikir dan cara seseorang menjalani pola hidupnya. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah aktivitas masyarakat. Aktivitas adalah tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud perilaku sering berbentuk sistem sosial, yang terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata prilaku. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. Dalam konteks penelitian ini, akan dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat perbatasan Indonesia dan Filipina yang telah ratusan tahun semenjak kedua negara belum merdeka, telah melakukan interaksi dengan aktivitas melintasi apa yang saat ini disebut sebagai perbatasan negara.

### Konsep Aktivitas ekonomi.

Menurut kamus *Cambridge Dictionary*, aktivitas ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas produksi, membeli atau menjual sebuah produk atau jasa. Sementara terkait dengan aktivitas ekonomi yang bersifat illegal di perbatasan, Somerville *et al.* (2015) mendefinisikan kegiatan ekonomi illegal sebagai sebagai sebuah proses di mana pengusaha memasok pelanggan dengan layanan atau produk legal, terlarang dan/atau illegal, namun seringkali tidak ada menyadari jika kegiatan tersebut adalah illegal. Dalam konteks penelitian, akan diteliti tentang aktivitas ekonomi di perbatasan yang cenderung dilakukan secara illegal antara masyarakat kedua negara melalui jalur laut.

### Konsep aktivitas illegal.

Passas didalam Chapsos *et al.* (2018) Mendefinisikan kejahatan lintas batas yang teroganisir sebagai sebuah pelanggaran yang melewati perbatasan sebuah negara, yang bertentangan dengan hukum nasional maupun

hukum internasional. Sebuah kejahatan akan dipandang sebagai kejahatan lintas batas jika pelaku maupun korban berada atau dilakukan dengan melintasi sebuah atau lebih dari satu negara. Chapsos *et al.* (2018) menyebutkan bahwa disaat pasar global dan komunikasi semakin terkoneksi, maka kegiatan ilegal dan tantangan dalam bidang kemanan juga semakin meningkat dan terus berkembang, seperti perdagangan manusia, penyeludupan tenaga kerja dan penyeludupan senjata api. Dalam konteks kegiatan ilegal antar negara, Graham (2011) menyebutkan jika Asia Tenggara merupakan lokasi utama penyeludupan manusia yang akan dipekerjakan di bidang perikanan. Saifudin & Karim (2018) menyebutkan bahwa banyak kegiatan ilegal yang dapat terjadi di laut, seperti pencurian ikan, transfer ilegal dan perompakan.

### **Konsep kekuatan laut.**

Didalam bukunya yang diberi judul *The Influence of Sea Power upon History*, Alfred Thayer Mahan menyebutkan bahwa laut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kejayaan suatu negara, Mahan menyarankan setidaknya enam kondisi yang harus dipenuhi suatu negara sebelum dapat dianggap sebagai kekuatan maritim, yakni: lokasi geografis, karakteristik wilayah darat dan laut, wilayah teritorial, jumlah penduduk, aspek masyarakat dan karakter pemerintahan. Dari keenam karakter tersebut, terdapat dua karakter yang terkait dengan tema penelitian yakni. Karakter nasional dan karakter pemerintah. Karakter nasional merupakan kecintaan yang tinggi tanah air dan kebanggaan atas kebesaran sejarah bangsa, yang bisa menjadi kekuatan dalam membangun negara. Dengan karakter nasional yang kuat, maka masyarakat akan dapat berkontribusi positif didalam pembangunan. Namun sebaliknya jika karakter nasional seseorang tidak cukup kuat dalam menghadapi tantangan dan godaan, maka orang tersebut tidak akan dapat

berkontribusi positif, dan bahkan berpotensi dapat menjadi pelaku-pelaku kegiatan ilegal seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Filipina di Sulawesi Utara. Karakter berikutnya adalah karakter pemerintah. Karakter pemerintah yang menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perbatasan, bersikap tegas atas setiap pelanggaran, dan senantiasa berkoodinasi dengan negara tetangga dalam implemtasi kebijakan/aturan, akan dapat membantu dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

### **Konsep kebijakan maritim.**

Christowa (2011) mendefisikan kebijakan maritim sebagai sebuah rangkaian kegiatan otoritas nasional, pemerintahan, badan usaha, lembaga publik, dan organisasi kemasyarakatan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut dan segala sumber daya didalamnya dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi negara. Kerangka kebijakan maritim secara tepat mendefinisikan metode dan instrumen keuangan, ekonomi, hukum dan administrasi untuk pelaksanaan tujuan strategis dan prinsip-prinsip pengendalian dan verifikasi kegiatan yang relevan. Selanjutnya terkait dengan konsep kebijakan maritim nasional, Christowa mendefenisikan sebagai dokumen yang diadopsi dan dilaksanakan oleh negara. Yang menggambarkan tujuan dan tugas dalam ekonomi maritim serta metode yang digunakan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas tersebut. Strategi pembangunan ekonomi maritim merupakan dokumen yang bersumber dari kebijakan maritim nasional. Panayides (2006) menyebutkan jika karakteristik perencanaan, kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis menghadirkan tantangan bagi peneliti dibidang maritim yang ingin berkontribusi pada kebijakan dan manajemen maritim. Bisher *et al.* (2012) menyebutkan jika kebijakan maritim sebagian besar negara

bagian saat ini terbagi antara banyak sektor yang berbeda, termasuk keamanan dan keselamatan, pelayaran, perdagangan, transportasi, energi, telekomunikasi, eksploitasi minyak dan mineral, perikanan, perlindungan lingkungan, penelitian ilmiah dan pariwisata, dan sedikit upaya yang telah dilakukan untuk mengkoordinasikan pengambilan keputusan sektoral ini. Akibatnya, terjadi konflik antar sektor, dan penggunaan sumber daya seringkali kurang optimal. Pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana semua penggunaan sumber daya laut diselaraskan, akan memastikan sistem yang jauh lebih efisien dan hemat biaya, meningkatkan keamanan dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan kinerja strategis bangsa.

### **Konsep Ketahanan Nasional.**

Friedland mengemukakan bahwa di tingkat nasional, ketahanan adalah kemampuan suatu masyarakat untuk menahan kesulitan dan krisis di berbagai alam dengan menerapkan perubahan dan adaptasi tanpa merugikan nilai-nilai inti dan institusi masyarakat. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan maupun mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa yang terintegrasi, mengandung keuletan, ketahanan dan mengandung kemampuan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar dan dengan menjamin identitas, integritas,

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan mencapai tujuan bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, masyarakat dan bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia. Sehingga dibutuhkan daya tahan dan keuletan seluruh elemen bangsa untuk membangun dan membangkitkan kekuatan bangsa dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan kekuatan bangsa harus diperkuat dengan menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan keamanan. Konsep ketahanan nasional secara retorik diubah dari respon psikologis individu terhadap trauma menjadi fenomena sosial bersama di tingkat nasional. Transformasi ini berpotensi menawarkan ketenangan psikis kepada masyarakat setelah terjadinya suatu bencana atau pada saat masyarakat mengalami duka/trauma.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yakni untuk memperoleh model yang dapat mempresentasikan pengaruh budaya masyarakat perbatasan terhadap kebijakan maritim serta implikasinya terhadap ketahanan nasional, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan tujuan memahami apa yang terjadi pada objek penelitian dengan cara deskriptif dan kuantitatif dalam hal dimensi, angka yang diukur dengan jelas yang perlu direkapitulasi, dijelaskan dan disimpulkan. Pendekatan kuantitatif dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian berubah dan berkembang menjadi lebih jelas. Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini terus mengamati, mengukur dan memproses data hingga menemukan jawaban masalah yang muncul. Sementara Firestone

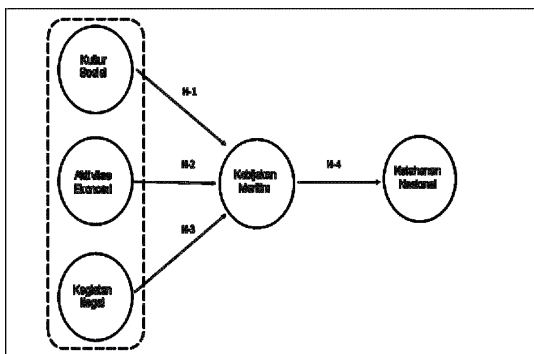
(1987) menyebutkan jika penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menjelaskan tentang perilaku melalui fakta yang objektif serta menunjukkan bagaimana bias dan kesalahan dapat dihilangkan. Penelitian kuantitatif juga berupaya menjelaskan penyebab perubahan fakta sosial, terutama melalui pengukuran objektif dan analisis kuantitatif.

### Pertanyaan penelitian.

Di dalam penelitian ini, peneliti menilai: (a) Sejauh mana hubungan antara kultur sosial masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim pemerintah Indonesia untuk memperkokoh ketahanan nasional Indonesia? (b) Sejauh mana hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim pemerintah Indonesia untuk memperkokoh ketahanan nasional Indonesia? (c) Sejauh mana hubungan antara kegiatan ilegal masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim pemerintah Indonesia untuk memperkokoh ketahanan nasional Indonesia? (d) Sejauh mana hubungan antara kebijakan maritim pemerintah Indonesia dengan ketahanan nasional Indonesia?

### Model penelitian (kerangka teori).

Model penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1, Model penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah: Kultur Sosial, Aktivitas

Ekonomi, Kegiatan Ilegal, Kebijakan Maritim dan Ketahanan Nasional.

Menurut Notoatmodjo (2010) kerangka konsep adalah formulasi atau simplifikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya, baik variabel bebas/independen maupun terikat/ dependen. Selanjutnya dibuat sebuah model yang bisa mendukung proses dan langkah-langkah dalam membuktikan/uji hipotesis yang akan diajukan. Model konseptual dan kerangka kerja didasarkan pada teori atau hasil penelitian dan pemikiran logis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil analisis data.

Penelitian ini menggunakan metode survei online dengan menyebarkan kuesioner yang di buat melalui program *Microsoft Form* kepada para responden dari berbagai latar belakang. Dari 216 responden yang mengisi kuesioner, terdapat 206 responden yang memenuhi kriteria dan 10 responden tidak memenuhi kriteria.

Setiap konstruk dalam survei ini menggunakan enam skala pengukuran (Skala Likert 6 poin) untuk setiap pertanyaan, dimulai dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Sedikit Tidak Setuju (SDTS), Sedikit Setuju (SDS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Untuk mengolah data hasil kuesioner dan menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan adalah program SPSS untuk menguji validitas data dengan *Exploratory Factor Analysis (EFA)*, dan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dengan tools program AMOS.

### Uji validitas data dengan *Exploratory Factor Analysis (EFA)*.

EFA adalah sebuah proses pengujian data dengan menggunakan program SPSS, guna

mengukur apakah setiap item yang ada didalam instrumen penelitian sudah sesuai untuk mengukur konstruk teoritis yang ada. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan terhadap data survey dari responden, dan dinyatakan valid jika memiliki *component matrix* atau *pattern matrix*.

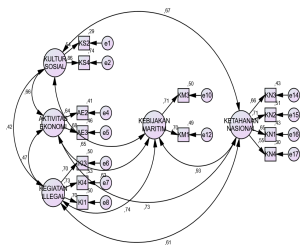
**Uji reabilitas.**

Uji reabilitas/*Reliability Analysis* adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan dapat diterima ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha/Coefficient Alpha*), dan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika *Cronbach's Alpha*  $\geq$  0.700.

**Uji Validasi Data dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA).**

Uji *Confirmatory Factor Analysis* bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menguji model dengan menggunakan aplikasi AMOS. Model akan dinyatakan fit apabila nilai P (*Probability*) pada CMIN > atau = 0.05.

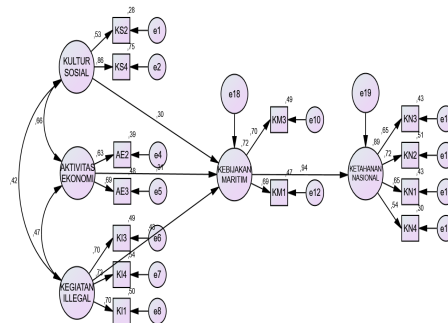
Gambar 2 menunjukkan model AMOS hasil modifikasi (*modification*), dan diperoleh nilai P= .112, sehingga model tersebut dinyatakan fit.



**Gambar 2. Model fit dengan perhitungan CFA**

**Uji hipotesis dengan SEM (Structural Equation Modelling).**

Setelah uji CFA dilakukan dan mendapatkan hasil model fit, kemudian dilanjutkan dengan uji model hipotesis *Structural Equation Modelling*. SEM merupakan teknik analisis multivariat yang umum dan digunakan untuk membangun/menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. Dan hasilnya akan dinyatakan signifikan apabila nilai *Critical Ratio (CR)* > 1.96.



**Gambar 3. Uji Structural Equation Modelling (SEM)**

Model diatas adalah model SEM hasil modifikasi (*modification*), dan diperoleh nilai P= .081, sehingga model tersebut dinyatakan fit.

**Hasil uji hipotesis.**

Tabel 4. Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
KEBUJAKAN_MARITIM	<--- KULTUR_SOSIAL	,367	,154	2,386	,017	Accepted
KEBUJAKAN_MARITIM	<--- AKTIVITAS_EKONOMI	,325	,149	2,182	,029	Accepted
KEBUJAKAN_MARITIM	<--- KEGIATAN_ILLEGAL	,352	,078	4,527	***	Accepted
KETAHANAN_NASIONAL	<--- KEBUJAKAN_MARITIM	,955	,123	7,739	***	Accepted

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) guna menguji hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa Hipotesis 1 (H-1): diterima, yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara kultur sosial masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim Pemerintah Indonesia. Hipotesis 2 (H-2): diterima, yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim Pemerintah Indonesia. Hipotesis 3 (H-3): diterima, yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan ilegal masyarakat perbatasan dengan kebijakan maritim Pemerintah Indonesia. Hipotesis 4 (H-4): diterima, yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan maritim Pemerintah Indonesia dengan ketahanan nasional Indonesia.

### Rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan kepada pemerintah serta *stake holder* terkait agar didalam menentukan kebijakan maritim khususnya yang akan diimplementasikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina di Provinsi Sulawesi Utara, untuk memperhatikan kultur sosial masyarakat perbatasan yang secara turun temurun selama ratusan tahun telah melakukan aktivitas ekonomi, melintasi laut yang setelah Indonesia dan Filipina merdeka kemudian disebut sebagai batas negara, serta melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan dapat berimplikasi positif untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional Bangsa Indonesia.

### Penelitian lanjutan.

Hasil dari penelitian ini merupakan konsep model pengaruh kebudayaan masyarakat

perbatasan terhadap kebijakan maritim dan implikasinya terhadap ketahanan nasional, selanjutnya peneliti mengajak para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dan dikembangkan kearah perhitungan yang lebih komprehensif antara variabel dan indikator secara lebih detail, terkait dengan faktor kebudayaan masyarakat perbatasan, kebijakan maritim dan ketahanan nasional sebagai sebuah sistem yang saling terkait dan saling mendukung.

### Penutup.

Penulis sangat berterimakasih kepada seluruh narasumber dan responden yang telah bersedia menjadi bagian didalam penelitian ini, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bisher, H., Gray, T., & Stead, S. M. (2012). The concept of integrated national maritime policy and its application to Saudi Arabia. *Maritime Policy & Management*, 39(5), 525-541.
- Bari, A. (2017). Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges. *Procedia engineering*, 194, 5-11.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53, 159-164.
- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255-273.
- Firestone, W. A. (1987). Meaning in method: The rhetoric of quantitative and qualitative research. *Educational researcher*, 16(7), 16-21.
- Graham, E. (2011). Transnational crime in the fishing industry: Asia's problem?



- Huffman, R. C., & Hegarty, W. H. (1993). Top management influence on innovations: Effects of executive characteristics and social culture. *Journal of management*, 19(3), 549-574.
- Hozairi, *et al.* (2018). Pemilihan Model Keamanan Laut Indonesia Dengan Fuzzy Ahp Dan Fuzzy Topsis. *Network Engineering Research Operation*, 4(1).
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2021). Maritime Security in the Border Area of Indonesia-Philippines: Study in the Waters of Sangihe Islands Regency and Talaud Island Regency. *International*
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Panayides, P. M. (2006). Maritime policy, management and research: role and potential. *Maritime Policy & Management*, 33(2), 95-105.
- Pattiradjawane, R. L., & Soebagjo, N. (2015). Global maritime axis: Indonesia, China, and a new approach to Southeast Asian regional resilience. *International Journal of China Studies*, 6(2), 175.
- Pramono, S., & Changming, L. (2019). Global Maritime Fulcrum and the New Eurasia: Opportunity and Challenge for Indonesia. In 3rd Annual International Seminar and Conference on Global Issues (ISCoGI 2017) (pp. 25-28). Atlantis Press.
- Saifudin, M. A., & Karim, A. (2018, September). LAPAN-A4 Concept and Design for Earth Observation and Maritime Monitoring Missions. In 2018 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES) (pp.1-5). IEEE